

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- A. Suriyaman Mustari Pide dan Sri Susyanti, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Adat*, Pelita, Makassar.
- A.P Parlindungan, 2008, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Bandung.
- Adrian Sutedi, 2010, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Adrian Sutedi II),
-----, 2013 *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Ali Ahmad Chomzah, 2002, *Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
-----, 2004, *Hukum Agraria*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Asikin zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- B. Ter Haar Bzn dalam Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto. 1994. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- Boedi Harsono, 2007, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksananya*. Edisi 2007. Djambatan, Jakarta.
-----, 2008, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- E. Fernando M.Manullang, 2016, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Eddy Ruchiyat, 2006, *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, P.T.Alumni, Bandung.
- Effendi Perangin, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia; Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.
- Fence M. Wantu, 2011, *Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, 2008, *Pengelolaan Perguruan Tinggi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Lon L. Fuller, 1971, *The Morality of Law*, New Haven, Yale University Press.

Nurhasan Ismail, 2006, *Perkembangan Pertanahan: Pendekatan Ekonomi-Politik*, Huma, Jakarta.

Rusmadi Murad. 2013. *Administrasi Pertanahan Pelaksanaan Hukum dalam Praktek*. Mandar Maju.

Soerjono ,Abdurrahman, 2003, *Prosedur Pendaftaran Tanah*, PT. Asdi Mahasatya, Jakarta

Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Supriadi, 2008, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2010, *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia*. Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.

-----, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, (selanjutnya disebut Supriadi I),

Syaifuddin Iskandar. 2010, *Eksistensi Lembaga Adat sebagai Mitra Kerja Pemerintah Daerah*.

Urip Santoso, 2012, *Hukum Agraria Kajian Komprehensif*, Kencana Prenamedia, Jakarta.

Wojowasito, WJS. Poerwadarminto, 1982, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia-Indonesia Inggris Hasta*, Bandung.

MAJALAH DAN JURNAL

Boedi Harsono dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, Laporan Hasil Penelitian "*Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan*", Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009.

C.C.J. Massen dan A.P.G. Hens sebagaimana dikutip Eddy Ruchijat dalam Tim Peneliti Universitas Nusa Cendana, Laporan Hasil Penelitian "*Penguasaan Hak Ulayat (Tanah Suku) dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Nusa Tenggara Timur*", Kerjasama Universitas Nusa Cendana dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Kupang: 2009.

Farida Patittingi, "Penegasan Alas Hak Penguasaan Fisik Turun-Temurun Dalam Praktik Pendaftaran Tanah", Amanna Gappa, Vol.19 No.4, Desember 2011.

Ilham Marowa, "Pengakuan Masyarakat Adat Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Hukum Adat Papua", Amanna Gappa, Vol. 19 No.4, Desember 2011.

Sandra Moniaga, "Hak-hak Masyarakat Adat dan Masalah serta Kelestarian Lingkungan Hidup di Indonesia", dalam Tim Peneliti Universitas Lambung Mangkurat, Laporan Hasil Penelitian "Pengakuan dan Penghormatan Negara terhadap Masyarakat Adat serta Hak-Hak Tradisionalnya di Provinsi Kalimantan Selatan", Kerjasama PPUU Dewan Perwakilan Daerah RI dengan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin: 2009, hal. 18-19.

INTERNET

[http:// Pritasitorus.blogspot30](http://Pritasitorus.blogspot30) . Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Atas Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan,Perpres No. 36 Tahun 2005 tentang pengadaan atas tanah bagi pelaksanaan pembangunan.

Irwan. <http://www.ireyogya.org/adat/peranan.htm>. Peranan Lembaga Adat dalam Era Otonomi Luas, Pada tanggal 21 Februari 2021

Maria S.W. Sumardjono, "Harmonisasi Kedudukan Hak Ulayat Dalam Peraturan Perundangan di Indonesia", <http://tanobatak.wordpress.com/2010/03/28/harmonisasi-kedudukan-hak-ulayatdalam-peraturan-perundangan-di-indonesia/>, diakses tanggal 20 oktober 2019

Usman Sumardjani, "Masyarakat Adat", <http://www.konflik.rimbawan.com/pdf> 16sept05/300masyFINALE.pdf, diakses tanggal 20 oktober 2019

UNDANG-UNDANG

Keppres Nomor 34 Tahun 2003, Tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan.

Perka BPN No. 9 tahun 2015 tentang tata cara penetapan hak komunal atas tanah masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu.

SURAT PENYERAHAN TANAH

Pada hari ini Selasa tanggal 21 Bulan September Tahun dua ribu empat
Kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. N a m a : YAKUP MANDACAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JLN. ESAU SESA

2. N a m a : MELKIANUS MANDACAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : RENDANI

3. N a m a : DORINCE MANDACAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JLN. ESAU SESA

4. N a m a : SEBLON MANDACAN
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : JLN. ESAU SESA

Selanjutnya disebut

PIHAK PERTAMA

N a m a : IBRAHIM AR
Pekerjaan : POLRI
Alamat : JLN. SERAYU SANGGENG MANOKWARI

Selanjutnya disebut

PIHAK KEDUA

PASAL I

Pihak Pertama Telah Menyerahkan Sebidang Tanah
Kepada Pihak Kedua yang Terletak di RENDANI GUNUNG Kelurahan Sowi
Kabupaten Manokwari dengan luas 10000 x 10000 M2 / 10.000 M2
BARAT berbatasan dengan tanah JONI INDOW
TIMUR berbatasan dengan BRIMOB
SELATAN berbatasan dengan Tanah Pemda
UFARA berbatasan dengan Pihak Pertama

PASAL II

Penyerahan Tanah tersebut ini dilakukan setelah didahului dengan Suatu

Musyawaharah, Mufakat anatar Pihak Pertama dan Pihak Kedua.....

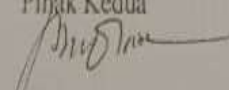
PASAL III

Setelah Pelepasan / Penyerahan Bidang Tanah tersebut ini
..... Dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Bidang Tanah ini selanjutnya
sudah menjadi HAK MILIK Pihak Kedua Maka Pihak Pertama dan semua Ahli Waris /
Keluarga tidak dapat Menggugatnya Kembali dalam bentuk apapun sesuai Hukum.

PASAL IV

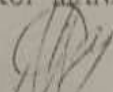
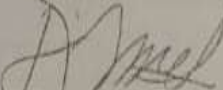
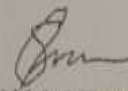
Penyerahan tersebut ini dilakukan dalam Kondisi Sehat Jasmani
Dan Rohani tanpa ada Unsur - Unsur paksaan dari pihak pihak lain.

..... Demikian Surat Penyerahan / Pelepasan Hak ini dibuat dengan Sebenarnya
Serta di buhuhi Tanda Tangan Masing masing di depan Saksi - saksi untuk dipergunakan
seperlunya.....


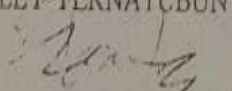
Yang Menerima
Pihak Kedua

IBRAHIM AR



Yang Menyerahkan
Pihak Pertama

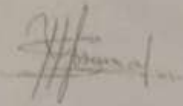
1. YAKUP MANDACAN

2. MELKIANUS MANDACAN

3. BORINCE MANDACAN

4. SEBLON MANDACAN

SAKSI - SAKSI

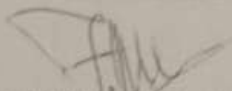
1. ELLY-FERNALUBUN

2. MARICE ROBAHA


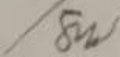
1. DANIEL MANDACAN

2. HENOK MANDACAN



3. SUSAN PW


3. AGUS MANDACAN


4. ISAK MANDACAN


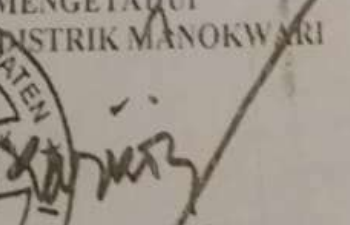

5. SOLEMAN ULLO


MENGETAHUI
KEPALA SUKU BESAR

SALMON MANDACAN


MENGETAHUI
KEPALA KELURAHAN SOWI

ELLY DOWANSIBA, SH
NIP. 640 024 995


MENGETAHUI
KEPALA DISTRIK MANOKWARI

SRORI ELISA S. Sos
NIP. 010 202 589